



LAPORAN TAHUNAN 2019

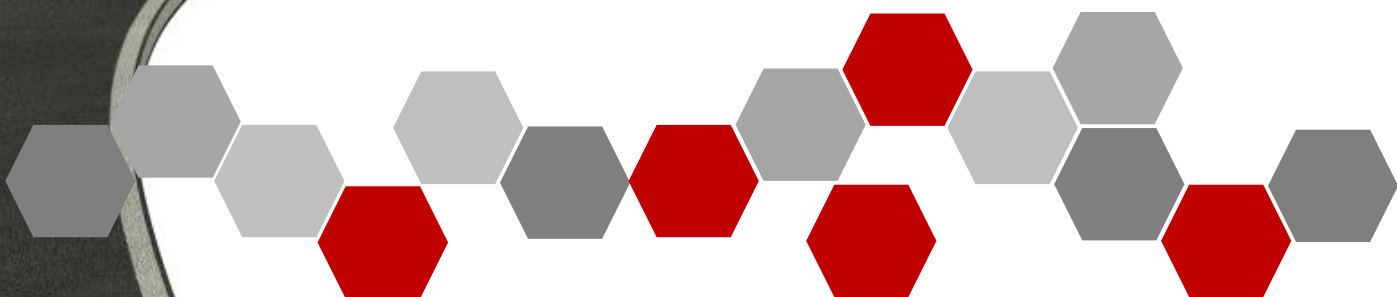
**Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

   [bptj151](#)

 [bptjkemenhub](#)

 bptj@dephub.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 ini bisa diselesaikan pada waktunya.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran keberhasilan baik makro maupun mikro, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, dan kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, laporan kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya good governance di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kinerja tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, telah dapat tercapai kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun sangat disadari bahwa dalam laporan ini masih dijumpai sejumlah kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 ini.

Jakarta,

**KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**



DR. ELLY ADRIANI SINAGA, M.Sc

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19570529 198303 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPTJ	2
1.3 VISI DAN MISI	5
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA BPTJ	6
1.5 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	7
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 RENCANA KERJA BPTJ TAHUN 2016	15
2.2 PERJANJIAN KINERJA BPTJ 2016	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
A. DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	18
1. Gambaran umum	18
2. Kegiatan-kegiatan Strategis	18
B. DIREKTORAT PRASARANA	19
1. Gambaran Umum	19
2. Kegiatan-kegiatan Strategis	19
C. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	20
1. Gambaran Umum	20
2. Kegiatan-kegiatan Strategis	20

D. SEKRETARIAT BPTJ	21
1. Bagian Perencanaan dan Keuangan	21
2. Bagian Hukum	21
3. Bagian Kepegawaian dan Umum	24
4. Bagian Humas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	24
3.2 REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV PENUTUP	27
BAB V LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

<u>TABEL I. 1 Jumlah pegawai menurut unit kerja Eselon II</u>	6
<u>TABEL I. 2 Jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan</u>	7
<u>TABEL II. 1 Rencana Kerja Tahun 2016 BPTJ</u>	15

DAFTAR GAMBAR

<u>GAMBAR I. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Sumber Lampiran PM. 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTJ</u>	5
<u>GAMBAR I. 2 Grafik Jumlah pegawai Tiap Unit Kerja Eselon II</u>	6
<u>GAMBAR I. 3 Grafik Jumlah pegawai Tiap Kualifikasi Pendidikan</u>	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Tahun 2016. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selama tahun 2016, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan di awal pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016. Komitmen dimaksud merupakan fokus Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan maupun kurang berhasil Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2016 berdasarkan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2016 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016-2019.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Capaian kinerja (*performance result*) tahun anggaran 2016 dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang telah disesuaikan dengan DIPA T.A. 2016 berikut revisinya, sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Analisis atas capaian kinerja tahun 2016 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPTJ

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Pasal 2 Kedudukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

1. Tugas BPTJ

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Pasal 3, BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegritas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

2. Fungsi BPTJ

Dalam melaksanakan tugas, sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Pasal 4, BPTJ menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jarata, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

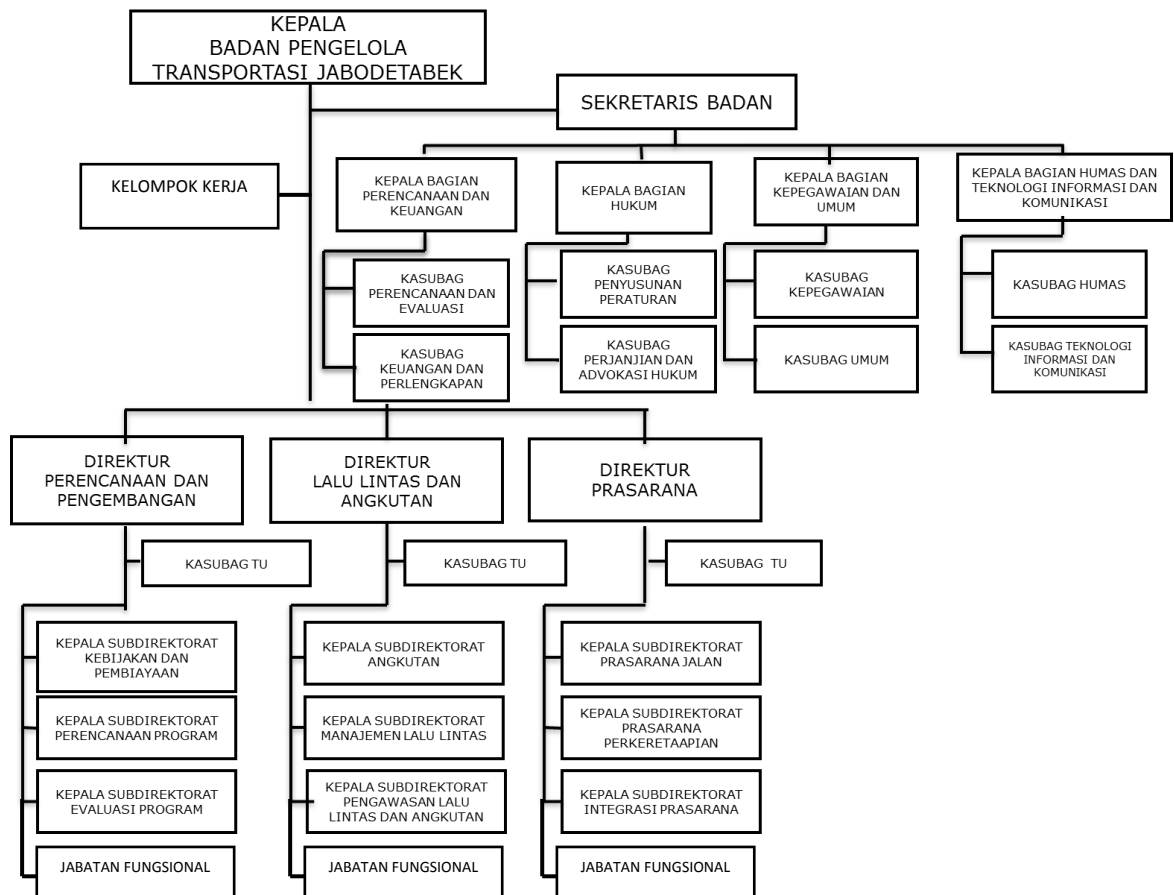
- d. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- e. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- f. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- g. Penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
- i. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder service);
- j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- k. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan
- l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

3. Struktur Organisasi BPTJ

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Pasal 4, susunan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ.
- b. Direktorat Perencanaan dan pengembangan
Direktorat Perencanaan dan pengembangan mempunyai tugas: melaksanakan penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan dan koordinasi pembiayaan, pemberian fasilitas teknis, koordinasi dan sinkronisasi rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi serta evaluasi dan pelaporan.
- c. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas: Melaksanakan fasilitasi teknis, anajemen peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum, pengembangan dan peningkatan sarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum, permintaan lalu lintas, pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal, pemberian perijinan angkutan umum yang melampaui batas propinsi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, serta koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi terkait dengan lalu lintas dan angkutan.
- d. Direktorat Prasarana
Direktorat Prasarana mempunyai tugas: Melaksanakan fasilitasi teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan prasaran penunjang angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan pelaksanaan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi terkait dengan prasarana.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terdiri dari :



GAMBAR I. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Sumber Lampiran PM. 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTJ

1.3 VISI DAN MISI

Visi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015 – 2019, yaitu “Terwujudnya peningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas orang dan barang/ jasa transportasi di wilayah Jabodetabek.” dengan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transportasi di wilayah Jabodetabek;
2. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan dan atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan, pengembangan sarana dan prasarana penunjang angkutan umum, serta pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek;

- Melakukan penyusunan rencana program, kebutuhan anggaran, regulasi dan kebijakan serta rekomendasi penataan ruang dan kebijakan perizinan yang berorientasi angkutan umum massal dan terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

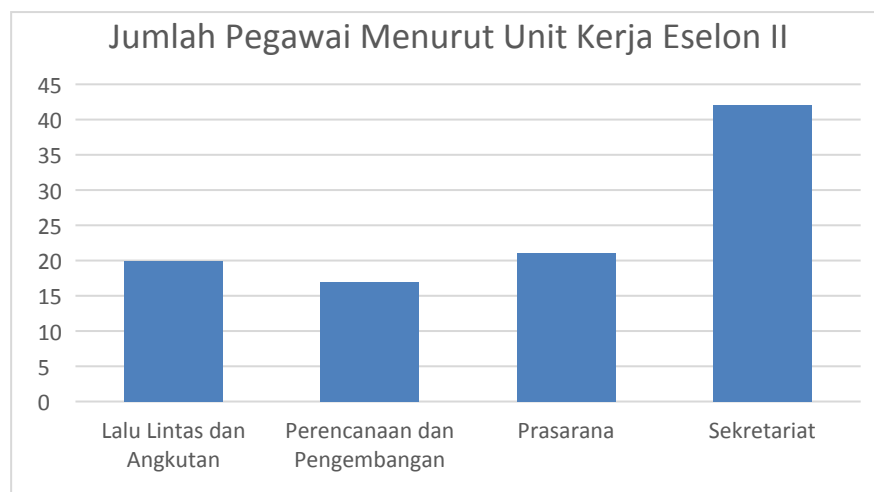
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA BPTJ

Dalam menjalankan tugasnya, pada tahun 2016 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek didukung oleh 100 orang pegawai, komposisi pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek disajikan sebagaimana tabel berikut:

- Komposisi pegawai menurut unit kerja Eselon II

TABEL I. 1 Jumlah pegawai menurut unit kerja Eselon II

	Jumlah
Dit. Lalu Lintas dan Angkutan	20
Dit. Perencanaan dan Pengembangan	17
Dit. Prasarana	21
Sekretariat	42
JUMLAH	100

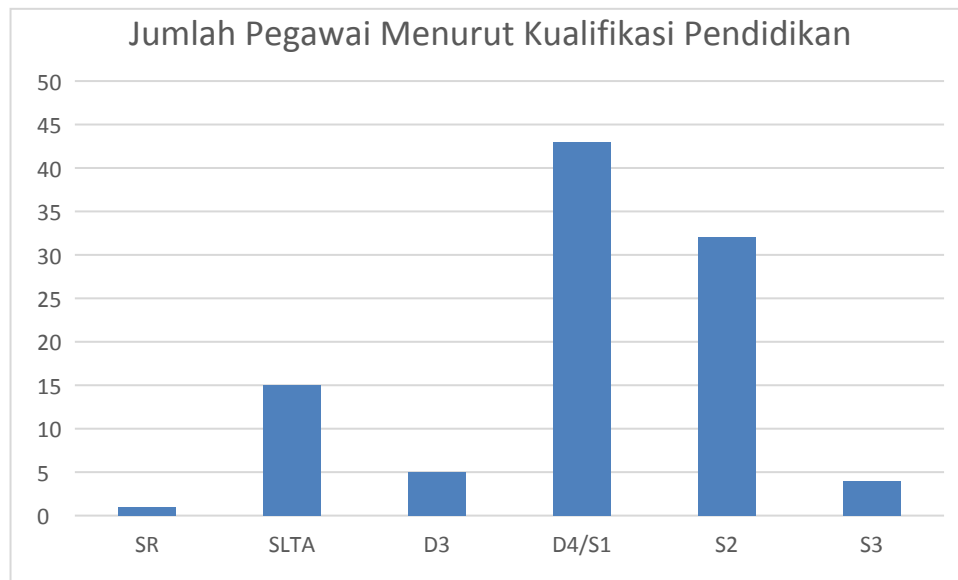


GAMBAR I. 2 Grafik Jumlah pegawai Tiap Unit Kerja Eselon II

2. Komposisi pegawai menurut kualifikasi pendidikan

TABEL I. 2 Jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan

SR	SLTA	D3	D4/S1	S2	S3	Jumlah
1	15	5	43	32	4	100



GAMBAR I. 3 Grafik Jumlah pegawai Tiap Kualifikasi Pendidikan

1.5 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek bahwa mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan pergerakan ulang-alik harian, sehingga layanan transportasi harus terintegrasi dan menerus, tidak terkotak-kotak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan. Dalam rangka peningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah pergerakan kendaraan bermotor yang terus meningkat, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, diperlukan

layanan angkutan massal yang terintegrasi baik antar moda maupun antar wilayah. Pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang efektif dan efisien akan dapat memperbaiki kondisi saat ini seperti penanganan masalah kemacetan, polusi, biaya tinggi, dan tingkat kecelakaan, sehingga diperlukan penanganan khusus.

Oleh karenanya pengelolaan transportasi Jabodetabek dalam 4 tahun ke depan harus secara sinergis memperhatikan berbagai perkembangan di sektor transportasi secara keseluruhan, sehingga diperoleh kinerja dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Berikut ini disampaikan beberapa perkembangan lingkungan strategis di sektor transportasi nasional yang perlu diperhatikan:

1. Perimbangan Pangsa Angkutan Antar Moda (Modal Share)

Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar dengan lebih dari 17.000 pulau hanya bisa terhubung dengan baik melalui sistem transportasi multimoda, tidak ada satu moda pun yang bisa berdiri sendiri. Masing-masing moda mempunyai keunggulan di bidangnya masing-masing. Pemerintah berfungsi untuk mengembangkan keseluruhan moda tersebut dalam rangka menciptakan sistem transportasi yang efisien, efektif dan dapat digunakan secara aman dapat menempuh perjalanan dengan cepat dan lancar.

Jaringan transportasi dapat dibentuk oleh moda transportasi yang terlibat yang saling berhubungan yang terangkai dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Masing-masing moda transportasi memiliki karakteristik teknis yang berbeda dan pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi geografis daerah layanan. Untuk wilayah perkotaan seperti Jabodetabek dimana penduduknya memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi, dibutuhkan angkutan massal yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Moda transportasi yang paling sesuai untuk kondisi tersebut adalah jalan dan kereta api yang berbasis angkutan massal.

Pada kenyataannya, berdasarkan analisis atas data survei ATTN 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan,

sampai dengan saat ini moda jalan masih sangat dominan di Indonesia, peran angkutan moda jalan mencapai 85% untuk pergerakan penumpang dan 91% untuk pergerakan barang. Sedangkan peran moda kereta api masih sangat marginal, yakni 3,18% untuk angkutan penumpang dan 0,16% untuk angkutan barang. Mengingat bahwa kapasitas kereta api dalam sekali perjalanan lebih besar dibandingkan dengan angkutan jalan, maka hal tersebut menyebabkan munculnya kemacetan di sejumlah ruas jalan nasional antar kota, khususnya pada ruas yang berbatasan dengan kawasan perkotaan yang sudah padat. Sedangkan jaringan jalan perkotaan mengalami gejala kemacetan yang lebih parah di mana data Bina Sistem Transportasi Perkotaan (2014) menyebutkan di 10 kota termacet di Indonesia kecepatan lalu lintasnya berkisar antara 20-30 km/jam.

Di masa mendatang, pembagian proporsi moda kereta api dan jalan harus berimbang sesuai dengan keunggulan komparatifnya, diantaranya: (1) untuk mengurangi beban jalan pada koridor utama di Jawa dan Sumatera; (2) untuk memberikan akses dari/ke kawasan potensial ke simpul pelabuhan/bandara; (3) untuk menyediakan angkutan massal penumpang di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan selamat; serta (4) untuk menyeimbangkan kontribusi ekonomi dan penyebaran penduduk ke wilayah lainnya melalui pengembangan jaringan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta skema keperintisan.

2. Konektivitas Transportasi Nasional

Tingginya biaya logistik nasional hingga sekitar 26% dari PDB, merupakan salah satu bukti yang harus diakui bahwa penyediaan jaringan dan sistem layanan transportasi nasional belum mampu menyediakan konektivitas yang efisien dan merata. Pengembangan simpul maupun jaringan layanan di masing-masing moda secara fisik belum direncanakan secara terpadu, adapun dari sisi layanan sistem transportasi intermoda/multimoda belum berkembang sama sekali.

Bahkan sampai dengan saat ini belum ada dokumen resmi tentang rencana pengembangan jaringan transportasi nasional yang terintegrasi di seluruh moda. Masing-masing moda masih merencanakan masterplan/rencana

induk/tatanan jaringan yang terpisah-pisah dengan pertimbangan intermodality yang sangat terbatas.

Sebagaimana diinginkan dalam agenda pembangunan nasional, seperti MP3EI (Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011) dan SISLOGNAS (Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012) bahwa dalam 10 tahun ke depan diharapkan sudah terwujud konektivitas transportasi nasional yang efisien dan handal yang menjangkau seluruh titik NKRI melalui jaringan transportasi intermoda/multimoda yang terintegrasi.

Pembangunan transportasi Jabodetabek dalam empat tahun ke depan perlu mengedepankan konsep konektivitas dalam jaringan intermoda/multimoda yang terintegrasi tersebut yang diejawantahkan dalam kebijakan, regulasi, maupun investasi yang dilakukan baik untuk pelayanan penumpang maupun barang antar kota maupun perkotaan. Apalagi sifat layanan dari moda kereta api, laut dan udara yang tidak door-to-door mengharuskan adanya integrasi melalui moda jalan sebagai feeder/angkutan lanjutan agar daya saingnya dapat dipertahankan.

3. Transformasi Regulasi dan Kelembagaan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sektor transportasi Indonesia sedang mengalami proses transformasi dari monopoli negara (atau BUMN yang disertai kewenangan sepenuhnya untuk mengelola suatu moda) ke arah pasar yang lebih terbuka bagi peran swasta maupun Pemda. Hal ini ditandai dengan ditetapkan sejumlah undang-undang baru di sektor transportasi pada periode tahun 2004-2009, diantaranya: UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang baru di sektor transportasi tersebut umumnya memperkenalkan kebijakan pemisahan kelembagaan antara operator dengan regulator serta mendorong partisipasi sektor swasta sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan transportasi. Ke depan Pemerintah akan

fokus menjalankan fungsinya sebagai regulator dalam membina penyelenggaraan sektor transportasi nasional yang target utamanya adalah menyediakan kebijakan dan regulasi/tata aturan yang baik dan fair sebagai platform/landasan bagi stakeholders terkait untuk bersaing secara sehat dalam penyediaan layanan transportasi, yang pada akhirnya akan dinikmati hasilnya oleh masyarakat melalui kinerja layanan yang lebih baik dan terjangkau.

Proses transisi dalam regulasi dan kelembagaan di sektor transportasi, termasuk di perkeretaapian, harus segera dituntaskan, karena hal ini akan menjadi landasan bagi terwujudnya sistem penyelenggaraan layanan transportasi yang maju, modern, terbuka, dan berdaya saing tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian untuk memisahkan BUP sarana dengan BUP prasarana untuk jalur yang dimiliki oleh Pemerintah belum terlaksana, agenda ini sangat penting untuk dituntaskan dalam 4 (empat) tahun ke depan. Selain itu, amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda angkutan lain sehingga perlu untuk memberikan perhatian lebih pada sektor ini.

4. Biaya Logistik Nasional

Pada Tahun 2014, World Bank merilis data bahwa LPI (Logistics Performance Index) Indonesia berada pada ranking 53 dunia, dengan skor 3,08. Sedangkan perkiraan total biaya logistik Indonesia masih sangat tinggi, yakni di atas 25% dari PDB, dengan komposisi 12,04% untuk biaya transportasi, 9,47% untuk biaya persediaan (inventory), dan 4,52% untuk biaya administrasi. Data tersebut menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi, bahkan jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8%), Malaysia (13%), dan Thailand (20%).

Moda kereta api memiliki peran penting dalam penurunan biaya logistik nasional, karena daya angkutnya yang besar akan menghasilkan efisiensi dari economic-of-scale jika sistem jaringan kereta api didukung dengan interkoneksinya dengan simpul pelabuhan dan kawasan industri dapat

dikembangkan secara optimal. Sementara moda jalan digunakan untuk segmen angkutan barang untuk kapasitas yang tidak terlalu besar dan jarak pendek, khususnya untuk door-to-door service.

Penurunan biaya logistik akan menjadi penentu daya saing Indonesia dalam kancah perekonomian global di mana pasar akan semakin terbuka. Logistik yang murah dan prudent akan memberikan nilai tambah bagi produk nasional, baik dari sisi biaya ataupun kualitas.

5. Konsumsi Energi dan Dampak Lingkungan

Sesuai perhitungan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, diperkirakan bahwa pada Tahun 2012 sektor transportasi mengkonsumsi BBM bersubsidi sekitar 42 juta KL, dan menyumbang sekitar 60-70% emisi gas rumah kaca (CO₂). Di masa datang isu energi dan lingkungan akan semakin relevan dengan semakin langkanya sumber energi dan menurunnya daya dukung lingkungan untuk menopang berbagai aktivitas dan kebutuhan warga dunia.

Indonesia melalui RAN-GRK (Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011) berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi BAU (baseline).

Dengan pengintegrasian transportasi perkotaan, antara jalan dengan kereta api yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi, diharapkan akan banyak mengurangi tingkat konsumsi BBM dan emisi gas buang baik untuk angkutan penumpang perkotaan maupun angkutan barang antar kota.

Isu Strategis Pengembangan Transportasi Jabodetabek :

1. Tingginya angka kecelakaan di jalan;
2. Pembebanan berlebih pada jalan;
3. Konvergensi kebijakan di bidang angkutan jalan (angkutan umum murah vs mobil murah);
4. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi;
5. Jumlah dan pelayanan angkutan umum yang belum memadai;

6. Belum tercapainya konektivitas/integrasi;
7. Otonomi daerah;
8. Peningkatan kualitas SDM;
9. Penyelesaian peraturan perundangan.

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2016 yang telah ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan disandingkan dengan pengukuran kinerja berupa capaian yang telah diperoleh selama tahun 2016, yang terdiri dari:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : Penutup

Tinjauan secara umum dengan mengemukakan capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

BAB V : Lampiran

Untuk memperjelas Laporan Akuntabilitas Kinerja, dilampirkan perhitungan-perhitungan, gambar dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode dan data lain yang relevan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA KERJA BPTJ TAHUN 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 – 2019 yang terdiri dari sasaran, indikator kinerja serta target yang ditetapkan sebelum DIPA tahun anggaran 2016 ditetapkan.

TABEL II. 1 Rencana Kerja Tahun 2016 BPTJ

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Pelayanan Transportasi Antarmoda	KEGIATAN	1
		Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Umum Jalan di Jabodetabek	KEGIATAN	1
		Penyusunan Rencana Umum Jaringan Lintas	KEGIATAN	1
		Penyusunan Rencana Umum Kebutuhan Taksi Jabodetabek	KEGIATAN	1
		Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Terminal Tipe A dan Tipe B (Yang Melayani AKAP) di Jabodetabek	KEGIATAN	1
		Penyusunan Rencana Umum Pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di Jabodetabek	KEGIATAN	1
		Survey dan Penanganan Perlintasan Sebidang di Jabodetabek	KEGIATAN	1
		Penyusunan Pedoman Teknis dan SOP Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	KEGIATAN	1
		Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Keselamatan Jalan di Jabodetabek	KEGIATAN	1
		Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki (Pedestrian) di Jabodetabek	KEGIATAN	1
		Penyusunan Rencana	KEGIATAN	1

		Implementasi Transjabodetabek Reguler	N	
		Pengembangan Jaringan Jalan Nasional untuk Keterpaduan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	KEGIATAN	1
		Survey dan Penyusunan Platform Sistem Informasi	KEGIATAN	1
2	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	Penataan Gedung/Bangunan BPTJ	TAHUN	1
		Gaji dan Tunjangan	TAHUN	1
		Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	TAHUN	1
		Pengadaan Kendaraan Bermotor BPTJ	TAHUN	1
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPTJ	TAHUN	1
		Pengadaan Perangkat dan Fasilitas Perkantoran BPTJ	TAHUN	1
		Penataan Gedung/Bangunan BPTJ	TAHUN	1

2.2 PERJANJIAN KINERJA BPTJ 2016

Pada konteks implementasi AKIP, Perjanjian Kinerja adalah rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 – 2019, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam empat tahun ke depan. Penetapan Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif).

Maksud Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tahun 2016 adalah untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 – 2019, yang memuat 3 (tiga) Sasaran dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama. Adapun perincian dari masing-masing sasaran adalah sebagai Tabel II.2 berikut:

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2016

NO	SASARAN BPTJ	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		SATUAN	TARGET TAHUN 2016
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	1	Waktu perjalanan orang rata-rata di dalam kendaraan angkutan umum adalah 1.5 jam pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan	menit	120
		2	Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di seluruh jaringan jalan minimal 30 Km/jam	km/jam	14
2.	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi dan Keterpaduan Sistem Transportasi Antarmoda dan Multimoda	1	Cakupan pelayanan angkutan umum di daerah perkotaan mencapai 80% dari panjang jalan	%	55
		2	Akses ke angkutan umum dengan berjalan kaki harus dapat dijangkau dalam jarak maksimal 500 m	meter	3.000
		3	Simpul transportasi harus memiliki fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir (park and ride) dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 m	meter	2.000
3.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan	1	Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum harus mencapai 60% dari total pergerakan orang.	%	24
		2	Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/jaringan cabang (feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (trunk) melalui satu simpul transportasi	kota	4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Untuk mengukur kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Gambaran umum

Sebagai unit kerja yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang melaksanakan tugas dalam koordinasi dan sinkronisasi rencana umum dan rencana program baik Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka Direktorat Perencanaan dan Pengembangan memiliki peran utama dalam perencanaan transportasi terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Oleh karenanya sasaran umum program kerja untuk tahun 2016 masih difokuskan pada perencanaan transportasi terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dengan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan, keterpaduan, konektivitas, dan mobilitas pergerakan orang dan barang di Jabodetabek yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat.

2. Kegiatan-kegiatan Strategis

Kegiatan strategis Direktorat Perencanaan dan Pengembangan pada Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)
- b. Penyusunan Pedoman Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
- c. Penyusunan Pedoman Transit Oriented Development (TOD)
- d. Pembangunan Sistem Informasi Transportasi Jabodetabek (Jasa Konsultansi)
- e. Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki (Pedestrian) di Jabodetabek.

B. DIREKTORAT PRASARANA

1. Gambaran Umum

Direktorat Prasarana mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan pengembangan dan peningkatan prasarana penunjang penyedia pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi terkait prasarana.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana telah menyusun program kerja yang didasarkan pada arahan pimpinan Kementerian Perhubungan melalui Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, program-program prioritas yang didasarkan atas isu-isu yang berkembang, kebutuhan mendesak, dan masukan-masukan dari berbagai pihak.

Direktorat Prasarana juga melaksanakan pembinaan pegawai, baik pembinaan melalui diklat penjejjangan dan diklat teknis, serta peningkatan pengetahuan melalui seminar, lokakarya, dan workshop. Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang telah diprogramkan juga melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan.

2. Kegiatan-kegiatan Strategis

Kegiatan strategis Direktorat Prasarana pada Tahun 2016, sebagai berikut

- a. Survey dan Pengembangan terminal tipe A dan tipe B (yang melayani AKAP) di Jabodetabek.
- b. Survei Pengembangan Jaringan Nasional Keterpaduan Pelayanan Angkutan Umum di wilayah Jabodetabek.

- c. Perencanaan Teknis Penanganan Perlintasan Sebidang di Jabodetabek.
- d. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Lintas di Wilayah Jabodetabek.
- e. Penyusunan Jaringan Pelayanan Transportasi Antar Moda di Wilayah Jabodetabek.

C. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

1. Gambaran Umum

Sebagai unit kerja yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang melaksanakan tugas dalam koordinasi dan sinkronisasi rencana umum dan rencana program baik Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan memiliki peran utama dalam perencanaan transportasi terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Oleh karenanya sasaran umum program kerja untuk tahun 2016 masih difokuskan pada peningkatan sarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum dan permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dengan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum dan permintaan lalu lintas di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat.

2. Kegiatan-kegiatan Strategis

Kegiatan strategis Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan pada Tahun 2016, sebagai berikut

- a. Pelaksanaan Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
- b. Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan wilayah Jabodetabek
- c. Penyusunan Rencana Kebutuhan Taksi Jabodetabek
- d. Penyusunan Rencana Implementasi Transjabodetabek Reguler
- e. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan di Wilayah Jabodetabek
- f. Penyusunan Surat Keputusan Kepala BPTJ tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek
- g. Penyusunan Legal Drafting Spesifikasi Teknis Kendaraan Angkutan Permukiman Premium

- h. Pencetakan Dokumen Blanko Perizinan Angkutan Umum
- i. Pemasangan peralatan penunjang dan Aplikasi Kegiatan Perizinan Angkutan Umum
- j. Pengoperasian Taksi dari Bandar Udara Soekarno Hatta
- k. Koordinasi Penentuan Kuota Taksi Bandar Udara Halim Perdanakusma

D. SEKRETARIAT BPTJ

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Sekretariat BPTJ adalah sebagai berikut:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kegiatan strategis Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
- b. Pembentukan Satuan Kerja (Satker)
- c. Penyusunan RKA-KL, DIPA dan PO 2017
- d. Revisi Anggaran 2016
- e. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- f. Pengangkatan Pengelola Anggaran.

2. Bagian Hukum

Kegiatan strategis Bagian Hukum pada Tahun 2016, sebagai berikut:

a. Pembentukan Peraturan

Bagian Hukum terlibat dalam penyusunan dan penerbitan Peraturan dan Keputusan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

- 2) Peraturan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.15/HK.601/BPTJ-2016 tentang Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.21/AJ.803/BPTJ-2016 tentang Pedoman Pelaksanaan evaluasi Dokumen Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Nasional di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- 4) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.004/PR.001/BPTJ-2016 tentang Tim Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Umum Jalan Tahun 2016;
- 5) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.005/PR.001/BPTJ-2016 tentang Tim Penyusunan Rencana Fasilitas Keselamatan lalu Lintas Jalan di Jabodetabek Tahun 2016;
- 6) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.006/PR.001/BPTJ-2016 tentang Tim Penyusunan Rencana Implementasi Transjabodetabek Ekspres Tahun 2016;
- 7) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.007/PR.001/BPTJ-2016 tentang Tim Penyusunan Rencana Implementasi Transjabodetabek Reguler Tahun 2016;
- 8) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.008/PR.001/BPTJ-2016 tentang Tim Penyusunan Rencana Umum Kebutuhan Taksi Jabodetabek Tahun 2016;
- 9) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.003/PR.001/BPTJ-2016 tentang Tim Kerja Penyusunan rencana Umum Jaringan Pelayanan Transportasi Antarmoda di Wilayah Jabodeabek Tahun 2016;
- 10) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor KP.004/8/18/BPTJ-2016 tentang Tim Kerja Penyusunan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Nasional Untuk Keterpaduan Pelayanan Angkutan Umum di wilayah Jabodetabek Tahun 2016;

- 11) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.002/PR.005/BPTJ-2016 tentang Tim Kerja Penyusunan Rencana Umum Jaringan Lintas di wilayah Jabodetabek Tahun 2016;
- 12) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.001/PR.001/BPTJ-2016 tentang Tim Teknis Kegiatan Perencanaan Teknis Penanganan Perlintasan Sebidang wilayah Jabodetabek;
- 13) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.017/PR.001/BPTJ-2016 tentang Tim Kerja Pengembangan Terminal Tipe A dan Tipe B Yang Melayani Angkutan Antar Kota Antar Provinsi di wilayah Jabodetabek Tahun 2016;
- 14) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.20/AJ.702/BPTJ-2016 tentang Tim Integrasi Sistem Pembayaran Jasa Angkutan Umum Dengan Tiket elektronik di Wilayah Jabodetabek;
- 15) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.11/PR.001/BPTJ-2016 tentang Tim Penyusun Roadmap Pembangunan Transit Oriented Development di Jabodetabek Tahun 2016;
- 16) Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SK.10/PR.001/BPTJ-2016 tentang Tim Penyusun Pedoman Teknis dan Standard Operation Procedure Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2016.

b. Penyusunan Naskah Kerjasama

Bagian Hukum terlibat dalam penyusunan naskah kerjasama sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPTJ Nomor 3558/-076.36 – HK.201/III/BPTJ-2016 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa sebagian Bangunan (Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3) Gedung Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal yang terletak di Jalan MT Haryono Kav. 45-46, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada BPTJ, Tanggal 16 Agustus 2016;
- 2) Kesepakatan Bersama antara BPTJ dengan PT. Trans Jakarta Nomor HK.201/1/4/BPTJ.2016 - 248/PJ.PT.TJ/X/2016, tentang Penyediaan Data

dan Informasi perjalanan dan Tarif Bus Transjakarta untuk Aplikasi Angkutan Umum di Jabodetabek, Tanggal 14 Oktober 2010;

- 3) Kesepakatan Bersama Antara BPTJ dengan Perum Damri Nomor HK.201/1/7/BPTJ.2016 - 160/AA.005/DU-2016, tentang tentang Penyediaan Data dan Informasi perjalanan Bus Damri Bandara untuk Aplikasi Angkutan Umum di Jabodetabek, Tanggal 19 Desember 2010;
- 4) Kesepakatan Bersama antara BPTJ dengan PT. KCJ Nomor HK.201/1/6/BPTJ.2016 - 148/HK-UM/KCJ/XII/2016, tentang Penyediaan Data dan Informasi perjalanan kereta api listrik (KRL) untuk Aplikasi Angkutan Umum di Jabodetabek, Tanggal 27 Desember 2016.

3. Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan strategis Bagian Kepegawaian dan Umum pada Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas
- b. Penyelesaian Pinjam Pakai Gedung
- c. Pembentukan ULP
- d. Penyusunan Peta Jabatan Pegawai

4. Bagian Humas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kegiatan strategis Bagian Humas dan TIK pada Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Pembuatan Buku Profil
- b. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Informasi

Beberapa kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi, baik melalui media cetak maupun online telah dilaksanakan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016, antara lain : sosialisasi dan pemberian penghargaan pelayanan terminal se – Jabodetabek,serta jumpa pers.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016, dana yang dialokasikan oleh Kementerian Perhubungan untuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah sebesar Rp. 44.125.098.000,-. Jumlah dana tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk melakukan kegiatan yang sudah disepakati selama tahun 2016.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	GAP
		Biaya	Biaya	Biaya
1	Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	2.355.100.000		
	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Pelayanan Transportasi Antarmoda	180.000.000	133.328.040	46.671.960
	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Umum Jalan di Jabodetabek	180.000.000	124.232.445	55.767.555
	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Lintas	180.000.000	129.560.110	50.439.890
	Penyusunan Rencana Umum Kebutuhan Taksi Jabodetabek	180.000.000	122.583.165	57.416.835
	Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Terminal Tipe A dan Tipe B (Yang Melayani AKAP) di Jabodetabek	180.000.000	140.642.970	39.357.030
	Penyusunan Rencana Umum Pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di Jabodetabek	180.000.000	130.771,560	49,228,440
	Survey dan Penanganan Perlintasan Sebidang di Jabodetabek	180.000.000	127.153.920	52.846.080
	Penyusunan Pedoman Teknis dan SOP Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	180.000.000	125,793,910	54,206,090
	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Keselamatan Jalan di Jabodetabek	180.000.000	105.625.995	74.374.005
	Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki (Pedestrian) di Jabodetabek	180.000.000	132,421,485	47,578,515
	Penyusunan Rencana Implementasi Transjabodetabek Reguler	180.000.000	130.263.145	49.736.855
	Pengembangan Jaringan Jalan Nasional untuk Keterpaduan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	180.000.000	138.364.695	41.635.305
	Survey dan Penyusunan Platform Sistem Informasi	195.100.000	147,452,905	47,647,095
2	Penataan Gedung/Bangunan BPTJ	3.762.645.000	3.762.125.300	519.700
3	Gaji dan Tunjangan	19.552.757.000		
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	3.832.130.000		
5	Pengadaan Kendaraan Bermotor BPTJ	6.276.670.000	6.120.926.000	155.744.000
6	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPTJ	1.770.442.000	1.712.939.000	57.503.000
7	Pengadaan Perangkat dan Fasilitas Perkantoran BPTJ	2.584.922.000	2.251.324.800	333.597.200

8	Penataan Gedung/Bangunan BPTJ	199.734.000		

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek secara umum telah sesuai dengan rencana. Namun demikian, dalam pelaksanaan masih dijumpai permasalahan-permasalahan terutama fasilitas penunjang seperti peralatan komputer yang masih kurang memadai dan SDM yang ada masih perlu ditambah.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka pada tahun anggaran 2017 telah diprogramkan untuk optimalisasi fasilitas serta memotivasi tenaga kerja honorer agar dapat membantu kegiatan yang ada di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Peran aktif seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional, dan staf di BPTJ dalam kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait serta dukungan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tercapainya kegiatan yang telah diprogramkan pada tahun anggaran 2017.